Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Oleh: Yakob KM (Maheswara Utama)



Agenda Pembahasan



Falsafah Dasar

Pancasila sebagai philosofische grondslag, prinsip filosofis, dan weltanschauung



Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia



Dasar Negara

Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara



Ideologi Negara

Pancasila sebagai sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek



Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai alat perekat kohesi sosial dan faktor integratif

Pancasila sebagai Falsafah Dasar

Prinsip-prinsip Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno menyebut Pancasila dengan tiga istilah:

- 1. Philosofische grondslag pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia Merdeka
- 2. Philosofische principe prinsip filosofis
- **3. Weltanschauung -** pandangan dunia atau pandangan hidup



Ir. Sukarno memperkenalkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945.

Weltanschauung: Pancasila sebagai Pandangan Dunia

Weltanschauung (pandangan dunia) dalam konteks Pancasila merupakan paradigma yang menentukan bagaimana seseorang:







Memaknai Realitas

Bagaimana seseorang memaknai realitas manusia dan alam sekitarnya

Membangun Hubungan

Bagaimana seseorang memaknai hubungannya dengan realitas manusia dan alam sekitarnya

Menentukan Tindakan

Apa yang harus dilakukan seseorang terhadap realitas manusia dan alam sekitarnya

Pandangan dunia ini menjadi landasan berpikir ketika berinteraksi dan bertindak dalam hubungannya dengan orang atau masyarakat lain, dilandaskan pada nilai-nilai yang diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat.



Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sebagai sebuah sistem filsafat, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mengalir dari esensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Ketuhanan

Mengakui bahwa kehidupan manusia berasal dari Tuhan. Manusia dikonsepsikan sebagai makhluk Tuhan, bukan dalam konteks individual seperti dalam liberalisme.

Kemanusiaan

Manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai tugas yang sama untuk mengembangkan dunia bagi kebaikan bersama.

Persatuan

Kebangsaan Indonesia adalah sikap aktif berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup, yang menjadi modal bernegara.



Pancasila sebagai Sistem Filsafat (Lanjutan)

Kerakyatan

Di dalam negara Indonesia, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar.

Keadilan Sosial

Tujuan berkehidupan negara bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan sosial.

Filsafat akan beralih menjadi *Weltanschauung* atau pandangan hidup ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendirian dalam realitas kehidupan.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi **sebagai pedoman dalam bertingkah laku**, baik hubungannya dengan:

- Tuhan yang menciptakannya
- Sesama manusia
- Lingkungan alam sekitarnya



Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

- Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
- Mengembangkan sikap saling menghormati dan kerja sama antarpemeluk agama
- Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain



Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Manusia Indonesia sadar bahwa semua manusia berkedudukan sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
- Mengembangkan kerja sama dalam kerangka itikad baik dengan bangsabangsa lain
- Mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya



Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- Sanggup berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
- Mampu membedakan tindakan dan sikap ketika berada dalam ranah privat dan ranah publik



Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

- Segala keputusan untuk kepentingan bersama wajib dilakukan melalui musyawarah dan proses yang demokratis
- Pelaksanaan hak asasi manusia dengan tetap menghormati hukum yang berlaku dan hak asasi warga negara lain
- Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku



Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Mampu mengendalikan diri dalam bertindak demi kehidupan bersama
- Mengembangkan sikap saling peduli dan saling tolong-menolong
- Membangun kerja sama tanpa pembedaan untuk tercapainya kesejahteraan bersama





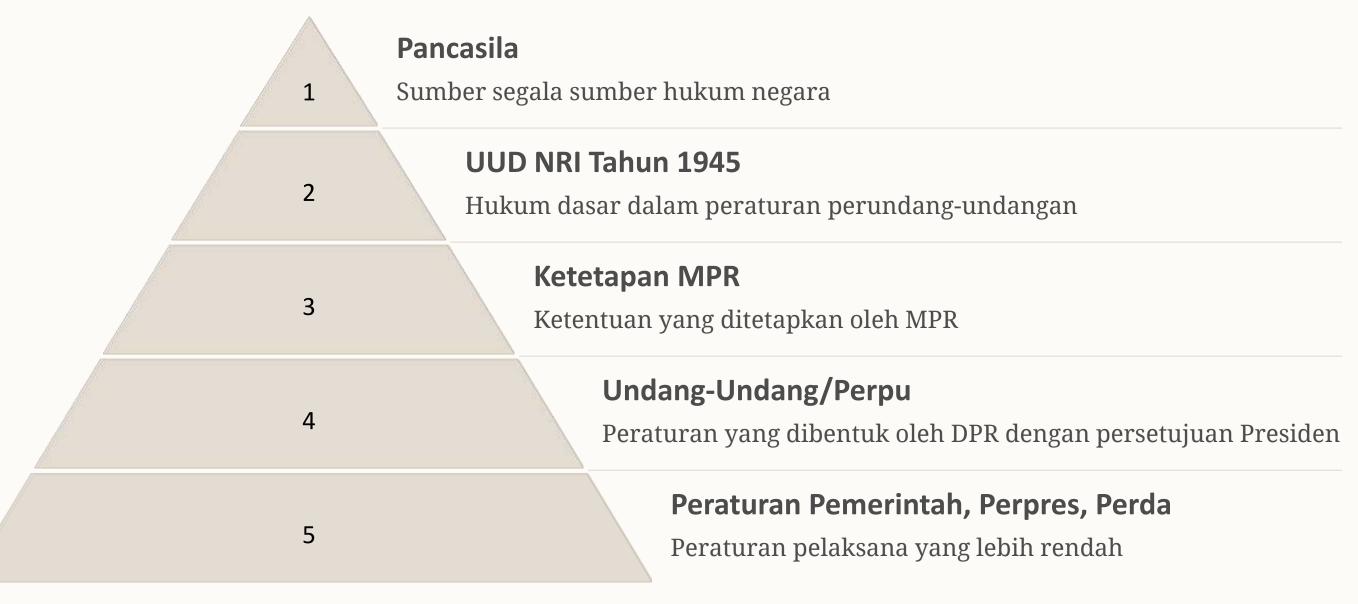
Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dikukuhkan dalam:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968
- Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022)

Pancasila dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan



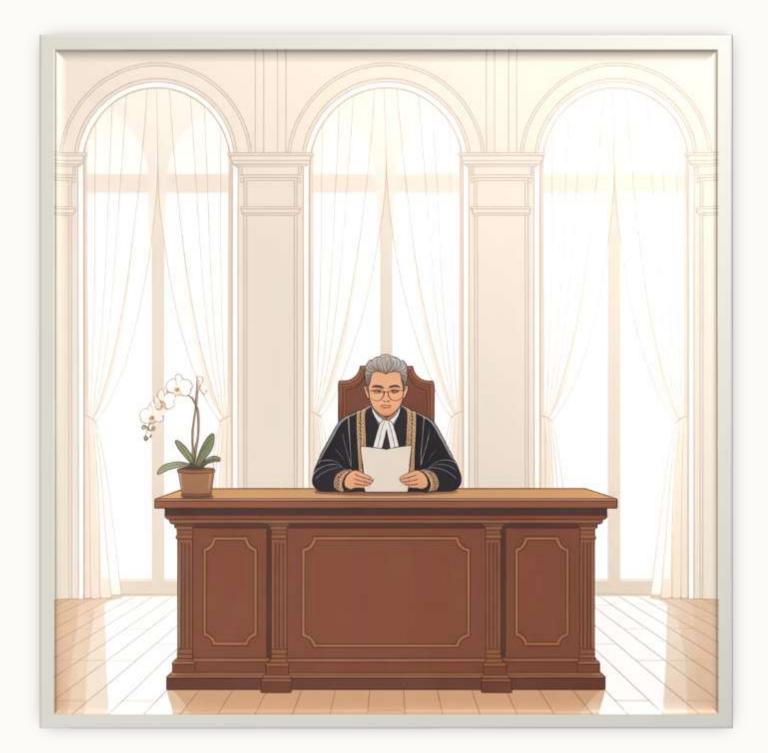
Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan *Staats fundamental norm* yang berkedudukan lebih tinggi daripada *Staatvervassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia sebagai Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini berarti:

- Semua kementerian, lembaga, dan warga negara harus tunduk pada supremasi hukum
- UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan
- Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945).



Gotong Royong: Inti Pancasila dalam Berhukum

Inti Pancasila adalah gotong royong yang harus diaktualisasikan dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan di Indonesia.

Sikap Dinamis

Gotong royong adalah bentuk sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian bersama

Jiwa dan Roh

Semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Membahagiakan Rakyat

Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya



Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Dalam rangka mencapai tujuan negara, penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, pertahanan-keamanan negara, dan politik luar negeri; Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun.

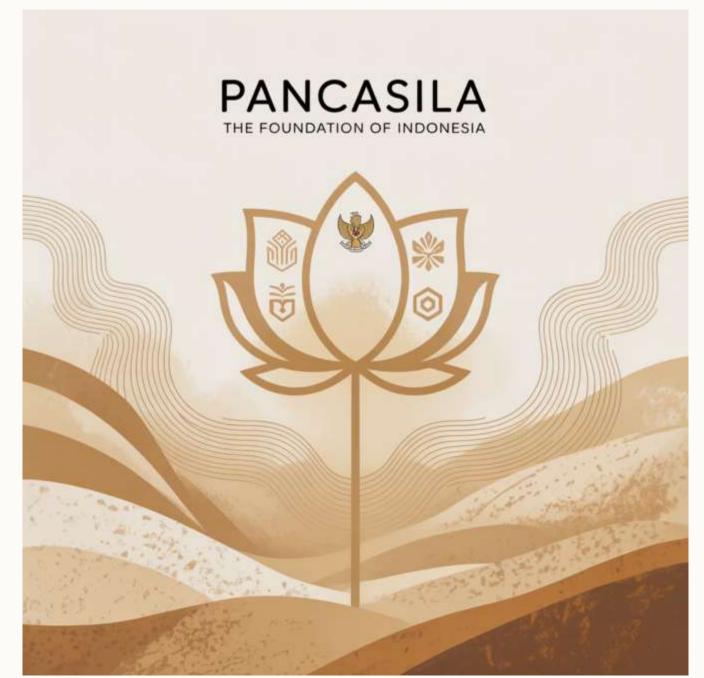




Pancasila sebagai Seperangkat Pemikiran

Secara akademik, ideologi dapat disejajarkan dengan paradigma. Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran yang:

- Bersumber dari pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia
- Diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa
- Memuat nilai-nilai penuntun untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur



Sumber Nilai-nilai Pancasila

Religiositas

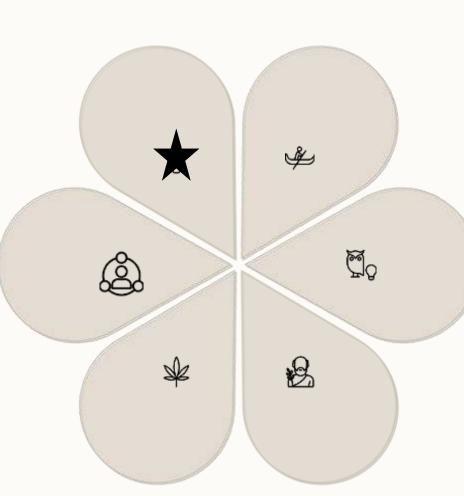
Nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia

Konsepsi Hubungan

Hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya

Budaya

Nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa



Adat Istiadat

Tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat

Kearifan Lokal

Kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman masyarakat lokal

Filsafat

Pandangan atau pemikiran yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan

Nilai-nilai dalam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa yang Ber-Tuhan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan (ateisme)

Pengamalan Berkeadaban

Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain

Kebebasan Beribadah

Bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masingmasing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan

Harmoni dalam Keberagaman

Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara





Nilai-nilai dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Negara Bangsa yang Berdaulat

Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat tetapi bukan chauvinistic (fanatisme)

Pergaulan Internasional

Bangsa Indonesia menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme

Bagian Kemanusiaan Universal

Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

Kesederajatan Manusia

Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

Nilai-nilai dalam Sila Ketiga: Persatuan Indonesia



Kesatuan Orang dan Tanah Air

Negara Kebangsaan Indonesia timbul karena persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya

Semangat Kebangsaan

Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Kepentingan Bersama

Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi



Nilai-nilai dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Negara untuk Semua

Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia

Demokrasi Berdasarkan Permusyawaratan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan

Demokrasi untuk Kesejahteraan

Demokrasi yang dibangun di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

Menghormati Hasil Musyawarah

Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah



Nilai-nilai dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kesejahteraan Bersama

Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin

Kesempatan yang Sama

Negara Indonesia wajib menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan

Kehidupan yang Layak

Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan

Kerja Sama untuk Kemakmuran

Negara mendorong tumbuhnya kerja sama antarwarga negara Indonesia dalam kerangka keberagaman untuk mewujudkan kemakmuran bersama

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Paham kebangsaan Indonesia tumbuh dari kesadaran subjektif yang dilandasi oleh:

- Persamaan nasib akibat penjajahan
- Pengalaman kegagalan ketika melawan penjajah secara sporadis
- **Kesadaran** tentang persamaan budaya dan pandangan hidup
- Kebutuhan bersama untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik

Kebangsaan telah menjadi alat perekat kohesi sosial, faktor integratif, dan titik yang mempertemukan kita sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional.



Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi komitmen seluruh pemuda dan seluruh golongan masyarakat untuk bersatu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

